

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah salah satu indikator dalam melihat pertumbuhan ekonomi yang hingga saat ini masih dijadikan tolak ukur sebuah negara dalam melihat tingkat keberhasilan kebijakan dari pemerintah. PDB dapat menggambarkan kinerja ekonomi, maka meningkatnya PDB akan membuat kinerja ekonomi negara semakin baik (Khair & Rusydi, 2016). Maka suatu negara dikatakan berhasil jika pertumbuhan perekonomian lebih tinggi dari tahun sebelumnya ditandai dengan meningkatnya barang dan jasa yang diproduksi.

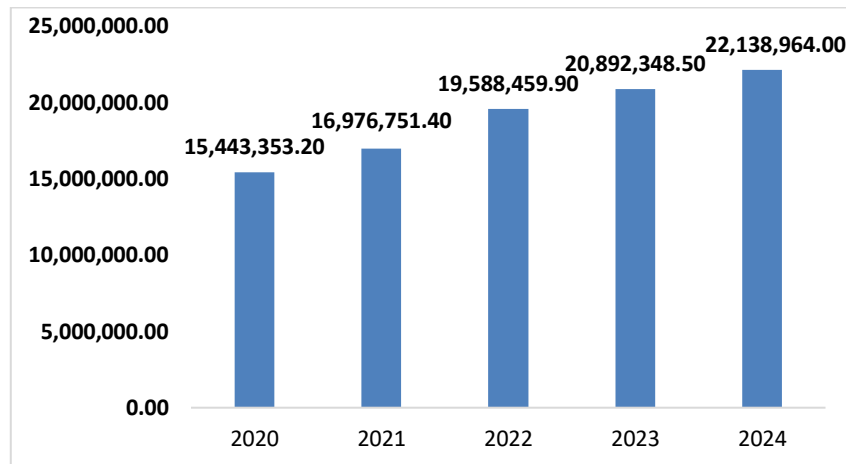
Pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada Produk domestik Bruto diatur dalam peraturan perundang-undangan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara imperatif menjadi dasar dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia (Ruslina, 2012).

Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menghitung PDB adalah pendekatan pengeluaran, yang menjumlahkan seluruh pengeluaran sektor ekonomi dalam suatu negara, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Dengan

menggunakan pendekatan pengeluaran, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi sektor-sektor mana yang perlu mendapatkan stimulus guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Studi oleh Sari & Permana (2022) menunjukkan bahwa komponen konsumsi rumah tangga dan investasi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB Indonesia, sehingga pemahaman terhadap dinamika pengeluaran agregat menjadi sangat krusial dalam upaya menjaga stabilitas dan akselerasi ekonomi nasional.

Oleh karena itu, PDB dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Indonesia adalah negara berkembang yang berfokus terhadap pergantian peristiwa pemerataan ekonomi nasional dalam perkembangan ekonomi. pertumbuhan ekonomi dicirikan seperti siklus yang mengakibatkan peningkatan dalam pembayaran riil per capita penduduk pada Negara jangka panjang di sertai dengan peningkatan pada kerangka kelembagaan (Rudi, M. I., Rotinsulu, T. O., & Avriano, 2016).

Sektor manufaktur, ekspor komoditas, dan investasi asing menjadi faktor utama yang mendukung pencapaian Indonesia. IMF mencatat bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur dan insentif investasi yang diterapkan pemerintah semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah global, menjadikannya sebagai salah satu negara berkembang yang berhasil menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini bisa ditunjukkan dari data yang telah dicantumkan sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

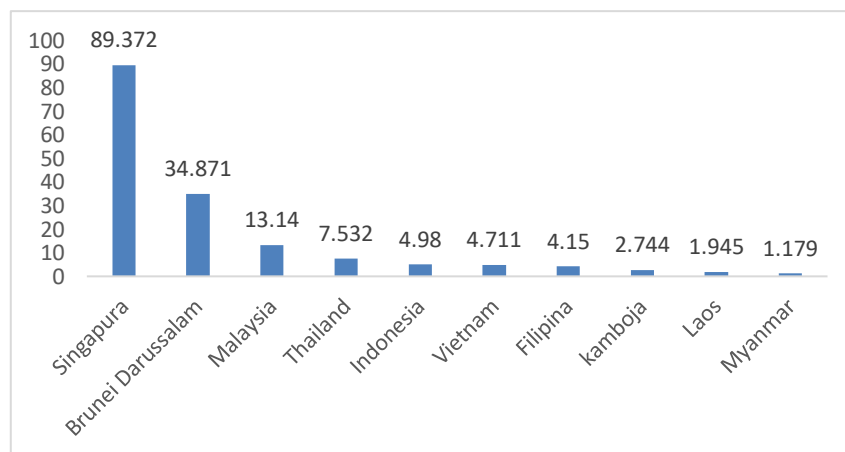
**Gambar 1.1 Data Produk Domestik Bruto 2020-2024 (Milyar Rupiah)**

Gambar tersebut menunjukkan data PDB 5 tahun terakhir, Pada tahun 2020, PDB berada di angka 15.443.353,20 milyar, ini merupakan masa awal pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi global dan nasional. Terjadi penurunan signifikan karena investor asing menahan ekspansi di tengah ketidakpastian global. Selain itu, terjadi lonjakan pengangguran akibat PHK massal terutama di sektor informal. Dengan itu, pemerintah menambah pinjaman luar negeri untuk kebutuhan penanganan pandemi dan program pemulihan ekonomi nasional. Lalu, pada tahun 2021 berada di angka 16.976.751,40 milyar. Mulai terjadi pemulihan ekonomi seiring pelonggaran pembatasan dan penanganan vaksinasi massal. Terjadi kenaikan PDB sekitar 10% dibanding tahun sebelumnya. Angka pengangguran mulai menurun perlahan, seiring dibukanya kembali lapangan kerja. Di tahun 2022 menyentuh di angka 19.588.459,90 milyar, pemulihan ekonomi semakin menguat. Sektor ekspor meningkat didukung oleh kenaikan harga komoditas global. Investor asing Melonjak, khususnya dari negara mitra dagang seperti Tiongkok dan Singapura,

ke sektor energi dan manufaktur. Selain itu, Utang luar negeri mulai Stabil, penggunaan lebih banyak digunakan untuk proyek produktif. Lalu, tahun 2023 ada di 20.892.348,50 milyar, Kondisi ekonomi mulai stabil, namun dihadapkan pada inflasi global dan kenaikan suku bunga dunia. Pasar kerja semakin pulih, kualitas kerja mulai menjadi isu penting antara produktivitas dengan kuantitas. Sedangkan utang luar negeri ditekan agar tidak bertambah terlalu agresif, fokus ke efisiensi belanja dan investasi. Terakhir, di tahun 2024 ada di angka 22.138.964,00 miliar. Perekonomian berada dalam fase ekspansi. Pemerintah fokus pada transformasi digital dan energi terbarukan. PDB menunjukkan pertumbuhan yang sehat dengan didukung oleh penanaman modal yang produktif, pasar tenaga kerja meningkat, meskipun tantangan pada kualitas SDM masih menjadi perhatian, dan manajemen utang yang lebih hati-hati. Dari 2020 hingga 2024, tren PDB Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahun, dengan percepatan tertinggi terjadi pada 2022. Data ini mencerminkan pemulihan ekonomi nasional yang efektif pasca-pandemi, serta ketahanan terhadap tantangan global.

Namun, Indonesia masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam (SDA) sebagai kontributor utama dalam Produk Domestik Bruto (PDB), terutama melalui ekspor komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan mineral. Ketergantungan ini menimbulkan permasalahan struktural dalam perekonomian nasional, karena membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan tekanan eksternal lainnya. Sektor industri pengolahan yang seharusnya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang justru

tumbuh lambat, sehingga nilai tambah dalam negeri tetap rendah. Hal ini menunjukkan belum optimalnya hilirisasi industri dan diversifikasi ekonomi di Indonesia. Menurut penelitian oleh Kuncoro (2020), dominasi sektor ekstraktif dalam struktur ekonomi Indonesia menjadi penghambat dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas dan daya saing global, karena SDA yang melimpah belum mampu diolah secara efisien menjadi produk bernilai tinggi.



Sumber: IMF, 2024

**Gambar 1. 2 PDB per Kapita 2024 (USD)**

Jika dilihat dari peringkat PDB per kapita dari sejumlah negara asean, Indonesia hanya menempati pada peringkat ke-5, tertinggal dari negara-negara tetangga yaitu Malaysia dan juga Singapura. Ini menunjukkan terjadinya permasalahan dari PDB di Indonesia yang cenderung mengandalkan sumber daya alam, dan kurang memperhatikan sumber daya manusia yang seharusnya bisa dimaksimalkan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia bisa dilakukan dari berbagai cara, salah satunya peningkatan kualitas pendidikan ataupun peningkatan pelatihan ketenagakerjaan.

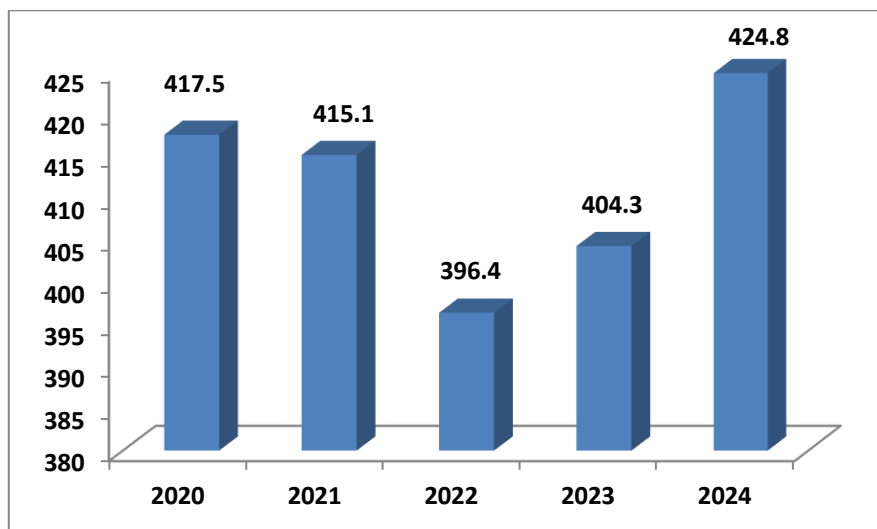
Keberhasilan pembangunan suatu negara ditentukan oleh berbagai faktor yang dimiliki masing-masing negara, salah satunya ketersediaan sumber daya.

Baik sumber daya modal, ataupun sumber daya manusia (Anwar, 2012). Maka dari itu, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya seperti utang luar negeri, penanaman modal asing, dan tenaga kerja termasuk dalam beberapa faktor yang mempengaruhi produk domestik bruto di Indonesia.

Yang pertama yaitu utang luar negeri, utang luar negeri dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang digunakan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam membiayai proyek-proyek besar di sektor infrastruktur dan industri. Meskipun demikian, pengelolaan utang luar negeri yang tidak hati-hati dapat menambah beban negara, yang berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana utang luar negeri dapat berkontribusi terhadap peningkatan PDB, dengan mempertimbangkan dampak positif dan risiko yang ada. Seperti yang telah diteliti oleh Pahimah dan Ichsan (2024) dimana dalam jangka panjang, utang luar negeri bisa berpengaruh positif untuk pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pemerintah Indonesia harus menambahkan utang luar negeri baru untuk membayar utang luar negeri lama yang telah berkembang. Akumulasi utang luar negeri dan bunga asing yang akan dibayarkan melalui rencana Belanja Negara Indonesia (APBN RI) dalam porsi setiap tahun rencana pengeluaran (Farida & Yuliana, 2022).

Dalam APBN, pembayaran utang luar negeri serta bunga pinjaman dari pihak asing menjadi salah satu komponen belanja negara yang harus diperhitungkan dengan cermat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dalam mengelola utang luar negeri (ULN) agar tetap memberikan manfaat bagi

pertumbuhan ekonomi tanpa membahayakan stabilitas keuangan negara (Siregar, H., & Hartono, 2021). Berikut ini adalah data grafik utang luar negeri selama 5 tahun terakhir.



Sumber: Bank Indonesia, 2024

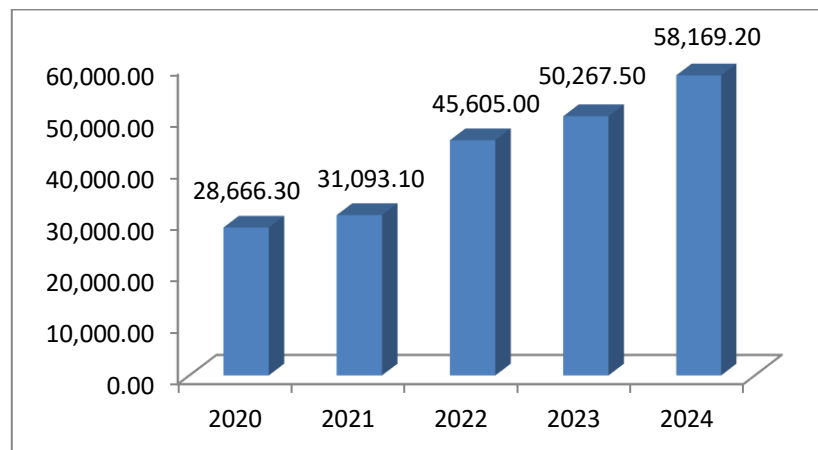
**Gambar 1.3 Utang Luar Negeri Indonesia 2020-2024 (Miliar USD)**

Gambar tersebut menunjukkan terjadi fluktuasi pada utang luar negeri dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, utang luar negeri Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu mencapai 417,5 miliar USD. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kebutuhan pembiayaan untuk menangani pandemi COVID-19, termasuk stimulus fiskal dan belanja kesehatan. Lalu pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi 415,1 miliar USD. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang yang jatuh tempo dan upaya pemerintah untuk mengelola utang secara lebih hati-hati di tengah pemulihan ekonomi. Di tahun 2022, utang luar negeri menurun menjadi 396,4 miliar USD. Penurunan ini terkait dengan penguatan nilai tukar Rupiah dan kebijakan pemerintah yang membatasi penarikan utang baru, seiring dengan pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Pada tahun 2023, kembali meningkat menjadi 404,3

miliar USD. Peningkatan ini disebabkan oleh kebutuhan pembiayaan untuk proyek infrastruktur dan investasi publik lainnya. Dan pada tahun 2024, utang luar negeri meningkat mencapai 424,8 miliar USD. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh lonjakan utang luar negeri Bank Indonesia (BI), yang naik hampir 94% dibandingkan tahun sebelumnya, terkait dengan penerbitan instrumen moneter untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Lalu, penanaman modal asing (PMA) juga memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi asing dapat membawa teknologi, manajemen yang lebih baik, serta membuka lapangan kerja baru. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam perekonomian (Pramono, A., & Susanti, 2020). Hal ini juga telah diteliti sebelumnya oleh (Mohamud & Warsame, 2024) yang menunjukkan bahwa utang luar negeri dan Penanaman Modal Asing berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, analisis pengaruh PMA terhadap PDB sangat relevan dalam konteks perekonomian Indonesia saat ini.

Penanaman Modal Asing tidak hanya membawa tambahan investasi dan teknologi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru. Keberadaan investasi asing dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor-sektor tertentu yang dapat mendorong laju PDB, seperti sektor manufaktur, industri, dan infrastruktur. Namun, ketergantungan yang berlebihan terhadap investasi asing juga berpotensi menambah kerentanannya terhadap fluktuasi ekonomi global. Berikut ini adalah data penanaman modal asing selama 5 tahun terakhir.



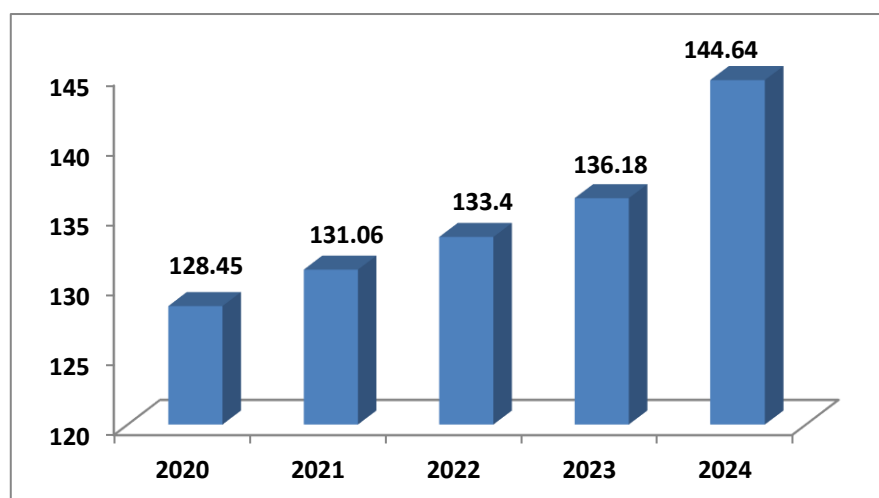
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

**Gambar 1.4 Penanaman Modal Asing Indonesia 2020-2024 (Milyar Rupiah)**

Gambar tersebut menunjukkan peningkatan penanaman modal asing dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat sebesar 28.666,30 milyar rupiah, pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakpastian ekonomi global, sehingga investor menunda atau membatalkan investasi. Lalu mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 31.093,10 milyar rupiah. Karena adanya pemulihan ekonomi global dan nasional setelah pandemi meningkatkan kembali minat investor asing. Pada tahun 2022 terjadi pergerakan hingga mencapai 45.605,00 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap ekonomi domestik. Tren ini terus berlanjut dengan peningkatan investasi menjadi 50.267,50 milyar rupiah pada tahun 2023 dan mencapai angka tertinggi sebesar 58.169,20 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan iklim investasi yang semakin kondusif, adanya kebijakan pemerintah yang mendukung investasi asing, terutama pada sektor manufaktur dan teknologi serta pertumbuhan ekonomi yang menarik minat investor internasional.

Lalu, ketersediaan tenaga kerja merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang tidak kalah pentingnya. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan kompeten merupakan kunci untuk memaksimalkan dampak positif dari utang luar negeri dan investasi asing. Menurut (Rahardjo, B., & Lestari, 2019), peningkatan kualitas tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi tenaga kerja yang sangat besar. Tenaga kerja yang produktif dan terampil dapat meningkatkan daya saing sektor-sektor ekonomi, diantaranya pada sektor industri baik di tingkat domestik maupun internasional. Seperti yang telah diteliti sebelumnya oleh Sewacotoma (2009) dimana tenaga kerja berpengaruh positif terhadap PDB sektor industri Indonesia. Berikut ini adalah data gambar grafik dari tenaga kerja selama 5 tahun terakhir.



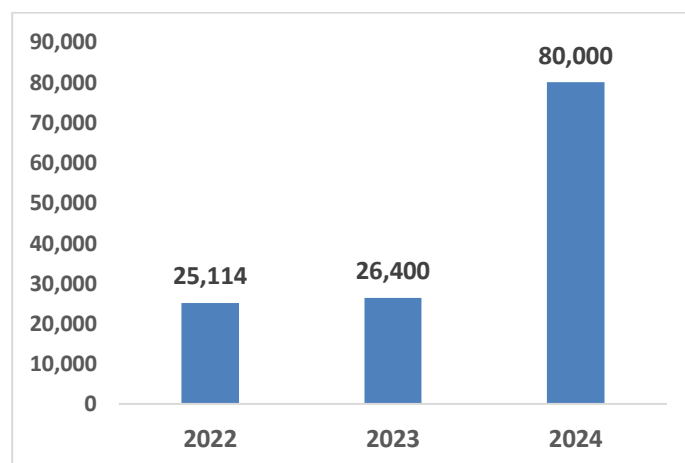
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

**Gambar 1.5 Tenaga Kerja Berdasarkan Penduduk Bekerja Usia 15-64**

**Tahun 2020-2024 (Juta)**

Bisa dilihat dari gambar grafik tersebut, pada tahun 2020, berada di angka 128,45 juta jiwa, Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan, yang berdampak pada peningkatan pengangguran dan penurunan jumlah tenaga kerja. Lalu pada tahun 2021 mengalami peningkatan, berada di angka 131,06 juta jiwa. Pemulihan ekonomi mulai terjadi seiring dengan pelonggaran pembatasan dan program vaksinasi massal. Di tahun 2022 kembali meningkat, menyentuh di angka 133,4 juta jiwa. Dimana perekonomian terus membaik dengan adaptasi terhadap kondisi pandemik. Selanjutnya di tahun 2023 berada di angka 136,18 juta jiwa. Pertumbuhan ekonomi yang stabil serta investasi di berbagai sektor, meningkatkan jumlah tenaga kerja. Terakhir di tahun 2024 peningkatan signifikan jumlah tenaga kerja mencapai 144,64 juta orang, naik 4,79 juta jiwa dari tahun sebelumnya.

Namun, dilihat dari pekerja yang terkena PHK juga ternyata meningkat dari 3 tahun terakhir. Berikut ini ialah data pekerja yang terkena PHK selama 3 tahun terakhir:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

**Gambar 1. 6 Data Pekerja Terkena PHK 2022-2024 (Jiwa)**

Dari data tersebut bisa dilihat bahwa dari tahun 2022 hingga dengan tahun 2024, pekerja yang terkena PHK meningkat drastis. Ini menunjukkan bahwa terjadi adanya *Gap* empiris, yaitu ketika hasil data sebelumnya tidak sesuai dengan temuan lapangan atau data empiris yang ada.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pemilihan jumlah tenaga kerja sebagai variabel independen yang belum banyak dibahas secara khusus dalam penelitian sebelumnya. Mayoritas penelitian terdahulu cenderung menggunakan variabel ekspor dan impor secara umum. Disisi lain, jumlah tenaga kerja merupakan salah satu sektor internal diantara sektor sektor eksternal seperti penanaman modal asing dan utang luar negeri. Sehingga bisa menjadi pembaharuan penelitian dengan menganalisis secara komprehensif bagaimana ketiga faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang positif dalam beberapa tahun terakhir, masih muncul perdebatan mengenai sejauh mana pertumbuhan tersebut berdampak terhadap sektor-sektor penting seperti utang luar negeri, penanaman modal asing, dan ketenagakerjaan. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu disertai dengan pengelolaan utang yang efisien, peningkatan investasi asing, ataupun penciptaan lapangan kerja yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pengaruh PDB terhadap ketiga variabel tersebut guna menilai kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia secara lebih mendalam.

Penelitian ini menggunakan paradigma normatif, fokus utama penelitian terletak pada bagaimana sesuatu seharusnya terjadi berdasarkan nilai-nilai, norma, atau prinsip ideal tertentu. Paradigma ini menekankan pendekatan preskriptif dan evaluatif, di mana peneliti tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga menilai serta memberikan rekomendasi mengenai tindakan yang dianggap paling tepat secara etis atau normatif.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia pada Tahun 2010-2024.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh utang luar negeri, penanaman modal asing, dan jumlah tenaga kerja secara parsial terhadap produk domestik bruto di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh utang luar negeri, penanaman modal asing, dan jumlah tenaga kerja secara bersama-sama terhadap produk domestik bruto di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh utang luar negeri, penanaman modal asing, dan jumlah tenaga kerja secara parsial terhadap produk domestik bruto di indonesia.

2. Untuk Mengetahui bagaimana pengaruh utang luar negeri, penanaman modal asing, dan jumlah tenaga kerja secara bersama-sama terhadap produk domestik bruto di Indonesia.

## **1.4 Kegunaan penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produk domestik bruto di Indonesia, menguji relevansi teori ekonomi makro terkait investasi asing, jumlah tenaga kerja, dan utang luar negeri dalam mempengaruhi produk domestik bruto.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Memberikan informasi mengenai sejauh mana utang luar negeri, penanaman modal asing, dan jumlah tenaga kerja berkontribusi terhadap produk domestik bruto. Juga membantu dalam perumusan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, terutama terkait investasi asing, manajemen utang luar negeri, dan peningkatan dalam sektor ketenagakerjaan.

## **1.5 Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di Indonesia, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi. Setiap variabel yang dianalisis diambil dari website Badan Pusat Statistik Indonesia, Bank Indonesia, Serta sumber terpercaya lainnya, dengan fokus pada periode yang relevan antara tahun 2010 hingga 2024.

